

# ISLAM DAN PLURALISME

*Suatu Kajian terhadap Islam dan Isu-isu Kontemporer\**

Oleh: Eko Marhaendy

## A. Pendahuluan

Tulisan ini dideskripsikan sebagai bahan diskusi pada mata kuliah Islam dan Isu-isu kontemporer. “*Islam dan Pluralisme: Suatu Kajian terhadap Islam dan Isu-isu Kontemporer*” merupakan tajuk yang dipilih untuk menjelaskan tema “Islam dan Isu-isu Pluralisme”. Persoalan yang muncul kemudian bukanlah terletak pada tepat atau tidaknya tajuk ini dipilih untuk mengangkat tema pluralisme sebagai salah satu kontemporer, akan tetapi, menurut hemat penulis problem yang lebih krusial sebenarnya terletak pada tepat atau tidaknya pluralisme diposisikan sebagai salah satu dari isu-isu kontemporer. Sebab, seperti yang pernah ditengarai Dawam Rahardjo dalam tulisannya bertajuk “*Islam dan Multikulturalisme*” yang dipublikasikan pada Buletin Kebebasan Edisi No II/Tahun 2007, karena pluralisme cenderung dimaknai negatif sebagai paham menyamakan seluruh agama, maka ada semacam kecenderungan menarik istilah tersebut pada terminologi lain yang lebih tepat, yaitu “Multikulturalisme”, karena memang terminologi pluralisme dimaksud tidak dapat dimaknai secara parsial sebagaimana yang banyak muncul di tengah masyarakat Islam.<sup>1</sup>

Selain persoalan di atas, setidaknya ada dua persoalan lagi—menurut hemat penulis—yang juga penting dikemukakan terkait dengan tema ini. Persoalan yang *pertama*, menyangkut istilah “kontemporer” yang cenderung digunakan banyak orang untuk menggambarkan istilah “kekinian”,<sup>2</sup> tapi tidak ada batasan yang jelas mengenai waktu yang menunjukkan makna kekinian tersebut. Jika kontemporer diartikan

---

\* Ditulis sebagai tugas mandiri pada mata kuliah Islam dan Isu-isu Kontemporer. Dosen pengasuh: Zainul Fuad, Ph.D. Naskah dapat diakses di: [www.ekomarhaendy.wordpress.com](http://www.ekomarhaendy.wordpress.com).

<sup>1</sup> Lihat Dawam Rahardjo, “Islam dan Multikulturalisme” dalam Buletin *Kebebasan*, Edisi No 2/Tahun 2007, h: 3-7

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008).

h, 751

aktual, penulis melihat pluralisme tidak tepat di posisikan sebagai isu kontemporer oleh karena isu ini merupakan isu yang hangat diperbincangan pada pada era 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Sesungguhnya masih banyak isu yang lebih tepat dikategorikan sebagai isu kontemporer, seperti isu kebebasan beragama dan berkeyakinan—yang sebenarnya masih dikaitkan juga dengan paham pluralisme—belakangan ini kembali muncul dalam pembicaraan publik dengan dilakukannya *judicial review* terhadap undang-undang No 1 PNPS/1965. Akan tetapi, pluralisme masih bisa dikategorikan sebagai isu kontemporer jika kontemporer dimaknai sebagai masa sepuluh atau dua puluh tahun terakhir.

Persoalan yang *kedua*, berkaitan dengan pemaknaan pluralisme itu sendiri. Ketika tema Islam dan pluralisme diangkat ke permukaan, maka ia akan menyulut perdebatan panjang. Istilah “perdebatan” tentu menggambarkan adanya dua pandangan yang berbeda, dan tentu saja perbedaan tersebut memiliki argumentasi masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa pluralisme bukan merupakan paham yang ditentang oleh seluruh umat Islam dan bukan pula sebaliknya. Dengan kata lain, pluralisme melibatkan dua kelompok yang saling bertentangan, di satu pihak menerima—jika bukan disebut membela—dan di pihak yang lain menolaknya. Jika boleh ditambahkan satu pihak lagi, ditemukan pula kelompok yang dapat menerima paham pluralisme dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Tulisan tentang Islam dan Pluralisme yang penulis sajikan pada makalah sederhana ini akan dideskripsikan berdasarkan berbagai persoalan yang dikemukakan di atas. Dengan berbagai keterbatasan, diharapkan makalah ini dapat menjawab, atau sekurang-kurang memberikan kontribusi pencerahan terhadap tema pluralisme yang masih menjadi persoalan akut di tengah masyarakat Islam pada umumnya.

## **B. Melacak Makna Pluralisme Agama**

Menurut hemat penulis, tidak ada rumusan yang tunggal tentang makna pluralisme, karenanya terminologi ini menjadi longgar untuk ditarik ke wilayah manapun. Sebagian pendapat memandang bahwa pluralisme merupakan terminologi yang terambil dari ranah Sosiologis, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa

terminologi ini terambil dari ranah filsafat. Terlepas dari perbedaan keduanya, satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme merupakan terminologi untuk menunjukkan paham kemajemukan.

Dalam Wikipedia berbahasa Inggris disebutkan “*In the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation*”.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pluralisme dalam ilmu sosial merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk (plural) yang harus ditata sedemikian rupa untuk menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik. Semetara itu, dalam pengertian yang lain, pluralisme dimaknai juga sebagai filsafat yang mengajarkan ada lebih dari satu macam “kebenaran terakhir”, yang dipertentangkan dengan aliran “monisme” atau “dualisme”.<sup>4</sup>

Dalam wacana yang berkembang berikutnya, pluralisme ternyata tidak saja menyentuh ranah filsafat dan sosiologi, akan tetapi pembahasannya juga turut menyentuh wilayah teologi, bahkan yang terakhir lebih dominan dimaknai dari dua aspek sebelumnya (filsafat dan sosiologi). Penulis mislanya, pernah menemukan sebuah artikel bertajuk “*Pluralisme Sosiologis Yes, Pluralisme Agama No*”, karenanya dalam konteks ini pluralisme mulai dilihat dari dua dimensi: sosiologis dan teologis. Pluralisme sosiologis menjadi semacam kondisi yang dapat dimaklumi (*yes*), sebaliknya pada ranah teologi pluralisme masih sulit untuk diterima (*no*). Namun demikian yang tak kalah menarik, pada saat yang sama demikian banyak opini yang muncul dari dunia Islam mengatakan “*No*” untuk istilah pluralisme dengan alasan apapun.

Sebutlah bahwa pluralisme dapat dilihat dari dua dimensi di atas (sosiologis dan teologis), menurut hemat penulis yang menjadi problem mendasar adalah pluralisme yang dimaknai dalam dimensi teologis yang secara awam kerap dipahami

---

<sup>3</sup> Suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran/pembiasan). Lihat <http://en.wikipedia.org/pluralism.htm>, diakses Maret 2010

<sup>4</sup> Lihat Osman Raliby, *Kamus Internasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 414.

sebagai “pembenaran atas seluruh agama dan kepercayaan yang ada”. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pluralisme dalam pemahaman semacam ini menganggap bahwa “semua agama benar”.

Terlepas dari perdebatan di atas, Pluralisme—dalam ranah teologis—ditengarai memiliki hubungan dengan pemikiran filsafat yang menandai lahirnya zaman baru yang disebut *post-modern* di Barat. Kesadaran ini lahir dari kalangan gereja melalui Konsili Vatikan II tahun 1962-1965. Pengakuan gereja terhadap kebenaran Kristen sebagai bukan satu-satunya kebenaran telah menciptakan apa yang disebutkan Eka Darmaputra sebagai *plural shock* (kejutan kemajemukan). Eka menegaskan, “kalau dulu agama Kristen pernah bermimpi menjadi agama satu-satunya di dunia, tidak saja merasa paling benar, tetapi juga satu-satunya yang benar, namun kenyataannya agama-agama lain juga tetap hidup subur, sehingga agama Kristen dipaksa atau terpaksa untuk hidup bersama agama-agama lain yang juga mempunyai ajaran yang tidak dapat dipandang rendah atau salah. Dengan demikian model *plural shock* menjadi semacam keharusan sejarah, dan bagi mereka yang tetap keras kepala bertahan dan tidak mau mengakui kenyataan baru ini akan menjadi orang-orang yang akan tercabut dari kenyataan, menjadi usang dan tidak relevan lagi.”<sup>5</sup>

Mencermati sejarah awal wacana pluralisme agama sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa wacana ini muncul berkaitan dengan bagaimana sikap keagamaan dalam memaknai kebenaran pada agama lain. Hal ini pada gilirannya memunculkan tiga bentuk sikap keagamaan yang biasa disebut dengan istilah eksklusifisme, inklusifisme, dan pluralisme. Dalam tradisi eksklusif, kebenaran dan kesempurnaan sebuah agama merupakan monopoli satu agama tertentu dengan, sedangkan inklusif lebih toleran dari itu. A. R. Golpeigani menyebutkan bahwa Karl Rahner merupakan simpatisan dari tradisi inklusif ini, di mana ia meyakini bahwa Kristen merupakan agama mutlak dan tidak ada jalan lain untuk bisa mencapai keselamatan kecuali mengembalikannya pada Yesus. Namun

---

<sup>5</sup> Eka Darmaputra, “Tugas Panggilan Bersama Agama-Agama di Indonesia”, dalam Dr. T.B. Simatupang dkk, *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1987), h. 133.

demikian, Rahner meyakini juga bahwa pengikut agama-agama lain mendapat keselamatan sebagai hasil iman mereka yang tidak dapat dipisahkan dari konteks historis, inilah yang disebut Rahner sebagai “umat Kristiani yang kehilangan status”.<sup>6</sup>

Inklusifisme—yang cenderung lebih terbuka dari sikap eksklusif—ditengarai menjadi embrio dalam membentuk sikap pluralisme dalam beragama. Jika pada pemaparan terdahulu disebutkan bahwa Pluralisme merupakan wacana yang lahir dari kalangan Gereja, maka ketika ia dikaitkan dengan seorang tokoh, nama John Hick akan segera muncul sebagai pemeluk Kristen yang meyakini bahwa agamanya bukanlah satu-satunya agama yang benar, melainkan kebenaran tersebut juga terdapat pada agama yang lainnya.<sup>7</sup>

### **C. Respon Islam Terhadap Pluralisme**

Jika pluralisme agama pada mulanya merupakan wacana yang berkembang di dunia Kristen, pertanyaan yang cukup akurat dikemukakan adalah: bagaimana respon Islam terhadapnya?. Pada prinsipnya, secara sederhana pertanyaan ini telah terjawab melalui paparan terdahulu, bahwa di dunia Islam ada kelompok yang menolak pluralisme tapi ada juga yang menerima, bahkan membelanya. Kelompok yang menolak pluralisme agama memiliki argumen tersendiri yang secara nyata disandarkan kepada Al Qur’an. Demikian halnya kelompok yang menerima pluralisme, mereka juga memiliki argumentasi tersendiri yang jelas-jelas disandarkan kepada Al Qur’an yang sama. Pertanyaan (awam) yang kemudian muncul adalah: mana yang benar dari keduanya? Kalau pertanyaan ini dijawab dengan prinsip-prinsip “pluralisme”, maka kemungkinan jawaban yang akan diterima adalah: keduanya benar, dan atau, keduanya biasa saja benar tapi bisa juga salah.

Menurut hemat penulis, perbedaan pandangan yang terjadi di dunia Islam terkait bagaimana “Islam” merespon wacana pluralisme pada dasarnya terletak pada perbedaan dalam memahami pluralisme itu sendiri. Istilah Islam yang diberikan tanda kutip ditekankan sebagai bentuk peniscayaan tentang pluralisme itu sendiri. Berbicara

---

<sup>6</sup> Lihat A. R Golpeigani, *Kebenaran itu Banyak: Menggugat Pluralisme Agama* (Jakarta: Al Huda, 2002), h. 25

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 25

mengenai Islam dari aspek manapun, biasanya membicarakan sesuatu yang banyak atau beragam. Ajiz Azmeh<sup>8</sup> sebagaimana dikutip Luthfi Assyaukanie menyebutkan tidak ada satu Islam, karena Islam selalu tampil dengan wajah yang banyak. Berangkat dari pandangan tersebut Luthfi kemudian menegaskan bahwa apa yang disebut Islam ideal sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah Islam Sunni, Islam Syiah, Islam NU dan lain-lain.<sup>9</sup> Bagi kalangan yang cenderung liberal, keaneragaman wajah Islam tersebut dipandang sebagai sebuah keniscayaan, mengingat Islam telah melewati sejarah selama lima belas abad hingga mengalami perkembangan yang demikian jauh melampaui Islam awal.<sup>10</sup>

Mengingat Islam memiliki wajah yang beragam (plural), maka penulis tidak berpretensi mengemukakan pandangan (repon) Islam terhadap pluralisme hanya pada satu pandangan saja, akan tetapi berupaya mengedepankan keduanya (yang menentang maupun yang menerima). Namun demikian, sekali lagi perlu ditekankan bahwa perbedaan keduanya terjadi karena perbedaan dalam memaknai pluralisme itu sendiri. Kelompok yang menolak pluralisme agama memahami pluralisme agama tersebut sebagai pahak yang berupaya menyamakan seluruh agama yang ada, sebaliknya kelompok yang menerima tidak demikian. Karenanya, dalam perdebatan tentang pluralisme agama boleh jadi keduanya sedang mempersoalkan satu terminologi dengan barang yang berbeda.

Menurut hemat penulis, pluralisme merupakan sebuah keniscayaan pada masyarakat yang plural karena pluralitas itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan.

---

<sup>8</sup> Aziz Azmeh adalah pemikir Suriah yang menulis buku berjudul *"Islams and Modernities"*, dan oleh Luthfi Assyaukanie dipandang sebagai judul yang cukup unik karena kata Islam dituliskan dalam bentuk jamak.

<sup>9</sup> Luthfi Assyaukanie (Penyunting). 2002. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, hlm:158

<sup>10</sup> Zuhairi Misrawi dan Novriantoni menuliskan bahwa Islam sebagai ajaran telah diturunkan ke muka bumi sudah berlangsung selama lima belas abad, ajaran-ajarannya tersebar luas menerobos ruang dan waktu: dari tanah kelahirannya di Timur Tengah hingga ke dataran Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Kondisi ini kemudian membuka peluang – sebagaimana ditunjukkan sejarah – penafsiran yang beragam atas Islam. Pencarian makna terhadap Islam akan terus mengalir seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman yang begitu cepat, dan salah satu keistimewaan Islam – tegas Zuhairi dan Novriantoni – adalah tatkala Islam menjadi agama yang memungkinkan munculnya aneka ragam pemahaman, karena Islam tidak membatasi ijtihad dan penafsiran. (lihat: Zuhairi Misrawi dan Novriantoni. 2005. *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*. [cetakan kedua]. Jakarta: LSIP)

Indonesia merupakan sebuah sampel masyarakat yang plural, dan sejatinya pluralisme merupakan satu hal yang tidak perlu ditolak, termasuk oleh umat Islam sebagai masyarakat dominan yang menghuni bumi Indonesia. Umat Islam bahkan tidak dapat memungkiri bahwa pluralitas merupakan fakta nyata, lantas bagaimana pada saat yang sama pluralisme—sebagai yang lahir dari pluralitas—ditolak oleh.

Dalam sebuah kesempatan penulis pernah berdialog dengan aktivis HTI seputar khilafah Islamiyah, penulis bertanya: seandainya cita-cita membangun khilafah Islamiyah yang diperjuangkan rekan-rekan HTI dapat terwujud suatu saat, apakah pemerintahan Islam (khilafah Islamiyah) ketika itu bisa mengakomodir kelompok-kelompok semisal Jamaah Ahmadiyah, JIL atau komunitas Lia Eden – misalnya, sebagai sebuah realitas pada wilayah kekuasaannya?, tanpa celah panjang aktivis HTI tadi menjawab “bisa”, bahkan ditopang dengan argumentasi bahwa Rasulullah pernah menjadikan seorang Yahudi sebagai salah satu juru tulisnya. Ini merupakan sebuah jawaban luar biasa yang menunjukkan bahwa kelompok semisal HTI yang cenderung dikategorikan radikal juga tidak mengingkari pluralitas, justru memberikan jaminan terhadap pluralitas (dengan mengakomodir berbagai kelompok tadi).

Tidak ada pluralisme tanpa pluralitas, demikian sebaliknya, pluralitas mustahil dibangun tanpa pluralisme, yang akan lahir justru *disintegrasi* jika masyarakat yang plural tidak dibungkus atas sebuah pemahaman yang sama ditengah aneka macam perbedaan. Karenanya, bagi masyarakat yang plural, pluralisme mestilah menjadi sebuah keharusan.

Memang cukup aneh ketika terjadi penolakan terhadap pluralisme oleh umat Islam yang hidup ditengah masyarakat yang plural, terlebih Indonesia. MUI misalnya, sebagai lembaga tempat berkiblat umat Islam Indonesia, tidak mengingkari pluralitas sebagai sebuah keniscayaan, namun tetap mengharamkan pluralisme (agama) sebagai paham yang harus dihindari umat Islam.<sup>11</sup> Jalaluddin Rakhmat bahkan menyebut MUI tidak paham dengan “pluralisme sebagai gejala sosiologis”, sembari menempatkan Dawam Rahardjo sebagai pluralisme politis, serta

---

<sup>11</sup> Fatwa MUI No. 7/ Munas VII/ MUI Tahun 2005

mengisyaratkan dirinya sebagai pluralisme teologis.<sup>12</sup> Jika demikian, wajarlah pluralisme mendapat penolakan karena maknanya sendiri masih *bias* dan belum mampu dirumuskan dengan pemahaman yang satu.

Sepanjang yang pernah penulis baca dan coba pahami, beberapa tokoh pluralis ternyata mengkonsentrasikan pemikiran dan sikap pluralismenya pada beberapa persoalan yang berbeda, sungguhpun masih memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visinya yang sama, yaitu menumbuhkan sikap toleran tanpa konflik dalam membangun interaksi terhadap yang lainnya. Pluralisme diyakini lahir sebagai gejala sosiologis—seperti ditegaskan pada bagian terdahulu—dengan kesadaran bahwa keanekaragaman (pluralitas) merupakan sebuah keniscayaan. Karenanya, perlu dibangun sebuah kesepemahaman guna menghindari konflik dan benturan dalam interaksi individu maupun kelompok.

Menurut hemat penulis, pluralisme dan relativisme – atau sejenisnya, mestilah menjadi dua persoalan yang harus dapat dibedakan. Pluralisme berangkat dari kesadaran bahwa perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan, kita hanya dapat berafilisai dengan komunitas yang berbeda tadi dengan menjadikan pluralisme sebagai titik tolaknya. Akan tetapi relativisme justru sebaliknya, menganggap semuanya sama. Substansi pluralisme sendiri adalah “toleransi” dalam melakukan interaksi satu sama lain.

---

<sup>12</sup> Buletin Kebebasan No 03/ V/ 2007 hal: 21



## DAFTAR PUSTAKA

- A. R Golpeigani, *Kebenaran itu Banyak: Menggugat Pluralisme Agama* (Jakarta: Al Huda, 2002).
- Dawam Rahardjo, “Islam dan Multikulturalisme” dalam Buletin *Kebebasan*, Edisi No 2/Tahun 20007
- Eka Darmaputera, “Tugas Panggilan Bersama Agama-Agama di Indonesia”, dalam Dr. T.B. Simatupang dkk, *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1987).
- Luthfi Assyaukanie (Penyunting). 2002. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Osman Raliby, *Kamus Internasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008).
- Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*. [cetakan kedua], (Jakarta: LSIP, 2005)